

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI

(Studi Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps)

Oleh

I Gede Adhi Suwarmas Kawiswara, NIM 2214101104

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa perjanjian jasa konstruksi serta menelaah akibat hukum penggunaan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam hubungan kontraktual. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana penerapan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dalam sengketa perjanjian jasa konstruksi dan bagaimana akibat hukum dari penggunaan dasar gugatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa yang bersumber dari perjanjian belum sepenuhnya tepat karena tidak memenuhi karakter hubungan kontraktual, sehingga secara doktrinal lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun demikian, putusan pengadilan tetap memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan secara proporsional dan berkeadilan. Pembahasan menegaskan adanya kekaburan norma antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa dalam putusan pihak tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, namun demikian putusan ini tetap mencerminkan pemenuhan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam proses peradilan perdata di Indonesia.

Kata Kunci: perbuatan melawan hukum, perjanjian jasa konstruksi, kepastian hukum, wanprestasi.

**THE ELEMENTS OF UNLAWFUL ACTS IN CONSTRUCTION SERVICE
AGREEMENT DISPUTES**

(A Case Study of Decision Number 129/Pdt.G/2024/PN Dps)

By

I Gede Adhi Suwarmas Kawiswara, NIM 2214101104

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the elements of unlawful acts in construction service agreement disputes and to examine the legal consequences of using unlawful act claims within contractual relationships. The research problems focus on how the elements of unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code are applied in construction contract disputes and the legal consequences arising from the use of such claims. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, particularly through the analysis of Decision Number 129/Pdt.G/2024/PN Dps. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the use of unlawful act claims in disputes arising from contractual relationships is not entirely appropriate, as it does not reflect the nature of contractual obligations; thus, doctrinally, it is more accurately classified as a breach of contract. Nevertheless, the court decision still provides legal protection to the injured party in a fair and proportional manner. The discussion highlights the normative ambiguity between breach of contract and unlawful acts in judicial practice. The study concludes that although the defendant was declared to have committed an unlawful act, the decision ultimately reflects the fulfillment of justice, expediency, and legal certainty within civil judicial proceedings in Indonesia.

Keywords: *unlawful act, construction service agreement, legal certainty, Breach of Contract*